

**BAB 4**  
**DIBALIK TUNTUTAN KINERJA TERSIMPAN MOTIF OPORTUNIS:**  
**Realitas Kesadaran Adopsi *Cloud Accounting***  
**Perspektif Operasional BUN**

**4.1 Pengantar**

Bab ini merupakan bagian pertama dalam pembahasan. Dalam bab ini menguraikan tahapan analisis data yakni pembahasan mengenai eksplorasi pemahaman dan kesadaran akuntansi berdasarkan pengalaman subjektif para informan. Bab ini berusaha untuk mengungkap kesadaran *user* dalam pengalamannya dalam praktik adopsi *cloud accounting* pada KPPN Kediri terutama dari sudut pandang *user* operasional Bendahara Umum Negara (BUN), yang mana disini diwakili oleh *user operator* dan *administrator E-Rekon & LK* di seksi verifikasi dan akuntansi KPPN Kediri.

Tujuan pemaparan bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kesadaran akuntansi berdasarkan sudut pandang pengguna yang terlibat langsung dalam proses pengimplementasian akuntansi berbasis *cloud* pada KPPN Kediri. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui sejauhmana para pegawai yang bekerja di bagian pelayanan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan memahami makna akuntansi serta seberapa pentingya peran sistem akuntansi *online* tercermin dari kesadaran mereka dalam berakuntansi menurut pemahaman masing-masing. Pemaparan pada bab ini dan selanjutnya merupakan hasil wawancara dan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para informan di lapangan. Selanjutnya menggabungkan deskripsi *noema* dan *noesis*, memilah berdasarkan tema-tema yang muncul dan dilakukan reduksi untuk memperoleh abstraksi makna berdasarkan pengalaman informan.

#### 4.2 Memahami Akuntansi *Cloud* Berdasarkan Sudut Pandang Informan

Akuntansi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang pemikiran yang beragam. Beragamnya sudut pandang pemikiran tersebut, akan menghasilkan pendefinisian yang berbeda-beda tentang makna akuntansi. Secara umum, akuntansi jika dilihat dari alur kerjanya, merupakan suatu proses pencatatan dan pengelompokkan transaksi keuangan ke dalam akun-akun serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Hal ini diyakini peneliti untuk menjadi jawaban pembuka atas wawancara yang dilakukan kepada *user* dari *cloud accounting* rekonsiliasi dan pelaporan keuangan di KPPN Kediri dalam hal ini perspektif kuasa BUN di daerah, terkait dengan pertanyaan tentang apa itu akuntansi, sebagaimana penggalan pernyataan Bapak SU sebagai pelaksana seksi verak berikut ini:

“...Kalo menurut saya.. Akuntansi kan adalah proses, namanya akuntansi itu ada suatu proses pengumpulan data, kemudian menganalisa data, menjurnal, sampai pada laporan keuangan, e-rekon ini proses akuntansi *gakkeliatan* (eksplisit), tapi secara sistem..(implisit) ya sesungguhnya ada, *cumadi* aplikasi ini tidak ditampilkan jurnalnya....”

Penjelasan makna akuntansi yang disampaikan oleh informan di atas, merupakan deskripsi makna tekstural yang menggambarkan akuntansi berdasarkan sudut pandang *operator E-Rekon & LK* BUN. Informan memberikan pandangannya yang mengartikan akuntansi dari sisi prosesnya, yakni dari mulai pengumpulan data, analisa transaksi, penjurnalan sampai pada pelaporan keuangannya. Secara spesifik terkait e-rekon-LK, satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana sistem akuntansi ini bekerja dengan memberikan penekanan pada ungkapan “prosesnya tidak keliatan”, proses yang tidak keliatan ini dipahami oleh informan sebagai tidak ditampilkannya jurnal dalam sistem aplikasi, sebab secara proses akuntansi dikerjakan secara sistem, sehingga tidak terlihat jurnalnya.

Penjurnalan merupakan proses penting dalam akuntansi. Secara urutan kegiatan ini merupakan tahap kedua dari siklus akuntansi setelah identifikasi transaksi. Suatu transaksi jika sudah diidentifikasi, kemudian akan dicatat, teknisnya adalah dengan menentukan perkiraan mana yang akan didebit dan mana yang akan dikredit. Dari perkiraan tersebut akan dimasukkan catatan yang disebut dengan jurnal. Hal ini sebagaimana lebih lanjut dijelaskan Bapak SU sebagai berikut:

“..katakanlah saat rekon ada perbedaan belanja, (sisi KPPN ada angkanya dan sisi satker tidak ada angkanya) terlihat gak ada jurnalnya, sesungguhnya satker belum menjurnal beban belanja lawan ditagihkan ekuitas lain... satker belum melakukan jurnal, artinya belum menjurnal karena belum memasukkan data di SAIBA..”

Dalam penggalan wawancara tersebut di atas informan mendeskripsikan struktur makna akuntansi yang dipengaruhi komputasi *cloud*. Sehingga walaupun secara kasat mata tidak ada jurnalnya dapat dipahami bahwa di dalamnya mengandung arti bahwa ketika belum merekam data transaksi ke dalam sistem aplikasi pendukung (SAIBA) yang nantinya data tersebut direkonsiliasi dan dikonsolidasi maka satker belum melakukan jurnal, dan sebaliknya jika sudah merekam maka otomatis terbentuk jurnal. Dari uraian di atas akuntansi yang sudah dipengaruhi oleh teknologi informasi ini bercirikan proses kerja yang tersembunyi dan terpusat, singkatnya terjadi otomatisasi proses komputasi jurnal, hasil rekonsiliasi dan konsolidasi data secara sistem.

#### **4.3 Realitas Kesadaran User Operasional Kuasa BUN**

Implementasi laporan keuangan *online* merupakan bagian dari inovasi pemerintah untuk mendukung program *good governance* berupa *e-government*, di mana cakupan dari *E-Government* ini salah satunya merupakan hubungan bentuk layanan *government to government* (Ferdiansyah dan Hidayat, 2014). Lalu dimanakah letak peranan *cloud accounting* di sini? mengambil peran sistem

informasi akuntansi yang menjembatani kebutuhan komputasi konsolidasi, maka kehadirannya mempunyai peran yang sentral dalam pelayanan.

Saat seseorang yang menjadi penyusun laporan keuangan pemerintah mengatakan “tidak dapat menghindari” karena penerapan ini adalah kebijakan yang telah ditentukan oleh pimpinan pusat maka ungkapan ini bermakna kepatuhan karena pemberlakuannya yang bersifat *mandatory*. Hal inilah yang menjadi titik poin awal di mana pembentukan kesadaran dalam menerapkan kebijakan tersebut muncul. Sejauhmana praktik ini dipahami yang tercermin dari kesadaran para pembuat laporan keuangan dan kendala-kendala yang muncul di lapangan tentunya akan menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

#### **4.3.1 Layanan Mandiri:Layanan 24 Jam, KPPN sebagai ATM Data**

Kehadiran bentuk akuntansi ini disadari oleh pengguna di KPPN sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Bapak SU menjelaskan bahwa hadirnya bentuk layanan akuntansi ini sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari, sebagaimana pernyataannya berikut ini :

“..Dari sisi organisasi kita harus mengikuti polanya, artinya sekarang itu harus berbau *high-tech*, maka mau tidak mau kita harus mengikutinya, sekarang itu yang saya rasakan, karena kita kan itu kantor layanan..”

Berdasarkan ungkapan informan tersebut menggambarkan bahwa hadirnya bentuk akuntansi *cloud* sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai KPPN Kediri untuk menerapkan pemanfaatan teknologi yang canggih dalam pelayanan. Ungkapan makna “*mau tidak mau*” mengandung arti bahwa kemajuan teknologi akuntansi tidak dapat dihindari. Secara kasat mata perubahan ditunjukkan dengan berkurangnya pegawai yang terlibat dalam proses kerja. Sebagaimana diungkapkan informan sebagai berikut:

“..dengan adanya teknologi ini, itu sudah menjadi konsekuensi yang sebelumnya pekerjaan harus diselesaikan 10 orang harus 5 orang ya tetapi..yang..artinya begini kita belajar terus.. belajar terus..”

Pernyataan Bapak SU tersebut di atas menggambarkan penjelasan *noesis* dari fenomena. Pernyataan di atas mengandung penjelasan bahwa Bapak SU menyadari bahwa dengan adanya teknologi baru ini merupakan konsekuensi dalam bekerja. Sebagai pegawai yang ditugasi, mau tidak mau mereka harus belajar terus menerus agar tidak ketinggalan, sehingga memberikan hasil yang maksimal atas kinerja yang dihasilkan.

Perubahan yang muncul dari sifat pelayanan adalah akses yang tidak mengenal tempat dan waktu. Sebagai ciri sistem akuntansi yang berbasis database pusat maka media penyimpanan data laporan keuangan tidak lagi berada di server KPPN maupun satker namun terpusat di database E-Rekon-LK. Secara istilah layanan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun disebut layanan *ubiquitous* (subbab 3.1.1) memungkinkan para *user* menikmati layanan akses atas database laporan keuangan secara *online via internet* sesuai kebutuhan dan kewenangan *user* atau *on-demand access* jaringan ke sumber daya komputasi. Penggambaran *noema* dari fenomena layanan mandiri ini dapat dilihat dari penggalan wawancara Bapak SU berikut ini:

“..Satker harus dapat melakukan rekon dengan mandiri.. sebagai BUN ada kaitannya ya gini ya.. rekon itu kan 24 jam.. mau tidak mau apa itu perilaku yang ada di seksi verak harus mengikuti sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada mitra kerja...”

Deskripsi di atas menerangkan deskripsi permukaan fenomena yang terlihat dengan pola bekerja yang harus mengikuti kebutuhan satker, dengan istilah layanan 24 jam harus mengupayakan berperilaku kerja *overtime* khususnya di akhir-akhir batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 10 setiap bulan. Sebagai bentuk kesadaran rupanya hal ini telah mendesak informan untuk berusaha mengikuti pola kerja yang terbentuk dalam rangka peningkatan layanan.

Bagaimana informan memandang sistem kerja ini yang mementingkan kemandirian satker dalam rekonsiliasi tak ubahnya analogi ketika orang

melakukan transaksi mengambil uang melalui ATM. Sebagaimana deskripsinya berikut ini:

“..Istilahnya KPPN sebagai ATM/ah.. ATM data.Karena kan Intinya kita ambil uang itu kan juga informasi ya.. kalo kita ke ATM, sebelumnya *gak* punya uang di tangan 1 juta, kita ambil kan akhirmnyaa kita dapat informasi uang kita satu juta *kan* pindah. Rekon kan juga gitu katakanlah..Sering jam 11–12 malam satker mau rekon kan, juga mau tau informasi rekon saya lakukan ini sudah benar gak to?, nah kami yang di KPPN sebagai ATM menyampaikan informasi.”

Dari deskripsi di atas kita mengetahui *noema* berikutnya dari fenomena layanan ini adalah seperti halnya layanan transaksi ATM pada bank Lebih lanjut informan memaparkan penjelasan subjektifnya bahwa konsekuensi perubahan pekerjaan ini menjadikan manusia ibarat mesin layanan ATM, analogi transaksi mengambil uang di ATM dengan layanan rekonsiliasi dan pelaporan keuangan online ini karena kemiripan, perbedaannya terletak pada uang yang digantikan oleh data keuangan sebagai informasi kepada satuan kerja bahwa transaksi keuangan direkonsiliasi sudah benar. Hal ini merupakan bentuk klarifikasi bahwa secara keseluruhan kehadiran akuntansi ini membawa konsekuensi perubahan layanan yang lebih mementingkan kegunaan mekanistik sistem akuntansi.

#### **4.3.2 Validitas Data Satker: Dilema Dan Cermin Pragmatisme "Kebenaran" Laporan Keuangan pemerintah**

KPPN Kediri sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara mempunyai tanggungjawab besar khususnya dalam menjamin terwujudnya akuntansi dan dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu sebagaimana disebutkan dalam salah satu misi organisasi KPPN. Imbasnya tugas dan tanggungjawab khususnya bidang pelaporan keuangan menjadi lebih berat. sebagaimana penggalan wawancara Bapak SU berikut:

“... KPPN sebagai kuasa BUN merangkum data-data dari satker, yang jelas kevalidan data dari satker itu juga merupakan kualitas data yang ada di KPPN ...”

Pernyataan di atas merupakan deskripsi *noema* yang menggambarkan bentuk kesadaran implisit terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPPN yang berstatus sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yakni sebagai penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat BUN daerah. Hal yang menarik di sini adalah munculnya tugas untuk menjaga validitas data dari satker yang mempengaruhi kualitas LKPP KPPN yang sebenarnya adalah tanggungjawab satker. Hal ini kemudian dipertimbangkan oleh peneliti sebagai sebuah gejala dilematis dari sisi KPPN sebagai kuasa BUN yang harus menjaga kevalidan data satker di sisi lain hal itu sebenarnya di luar kontrol KPPN itu sendiri.

Kevalidan data sangat tergantung dari usaha dari masing-masing satuan kerja untuk memastikan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar-benar sah secara legal. Transaksi belanja belanja harus dilampiri dokumen berupa kuitansi yang sah, dibukukan sesuai tanggal bukunya, sesuai haknya untuk membukukan, kodifikasi akun yang sesuai, dan secara jumlah rupiah sesuai dengan arsip pendukung, misalnya anggaran belanja sesuai dokumen DIPA.

Peneliti selanjutnya menangkap hal tersebut di atas sebagai deskripsi awal fenomena yang perlu penjelasan lebih lanjut. Aspek validitas data seperti apakah yang menjadi perhatian. Selanjutnya informan memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“..karena itu kan sistem ya, karena sistem itu sudah dibangun ya, jadi bagaimana operator walaupun tidak mengetahui akuntansi tetapi yang penting angkanya sama, jurnalnya dan laporannya nanti sama.. yang penting angkanya sama. Namanya rekon kan datanya satu, data dari satker, cuma diproses berbeda-beda.. kalo datanya sama pasti akuntansinya sama.. itu pasti LK juga sama. Kalo menurut saya, mesti benar, kita jurnal di KPPN, jurnal belanja kan itu asalnya dari satker, kalo satker menjurnal A di KPPN menjurnal A.”

Dari penjelasan di atas kevalidan data dimaknai sebagai data yang sama oleh informan. Kalimat yang berbunyi “*yang penting angkanya sama*” menjelaskan bahwa walaupun operator tidak mengetahui akuntasiselama hasil rekonsiliasi data sama antara satker dengan KPPN, maka bagi informan hal tersebut sudah benar. Penyederhanaan pengertian “kebenaran” laporan sebagai “data rekonsiliasi sama” ini mengandung risiko *misleading* saat menilai validitas laporan keuangan.

Validitas data disadari oleh informan sebagai konsistensi yang artinya bagi peneliti sebagai *overlapping* dengan makna reliabilitas atau keandalan data. Reliabilitas berkenaan dengan sejauh mana suatu pengukuran menghasilkan data yang sama, sedangkan validitasmerujuk pada sejauh mana suatu pengukuran menghasilkan kebenaran data, namun informan menganggap kedua hal tersebut mengandung pengertian yang sama yakni kesamaan angka dalam data yang menjadi hasil dari fungsi rekonsiliasi.

#### 4.3.3 Perangkapan Penggunaan UserUntuk Memenuhi Target Kinerja Rekonsiliasi

Pemisahan kewenangan *user* sebenarnya sudah diatur dalam manual aplikasi, yakni pemisahan *user* kepala kantor, *user* kepala seksi verak, *user* administrator dan *user* operator seksi verak. Dalam organisasi pemisahan wewenang seperti tersebut di atas merupakan bentuk pengendalian internal, namun di sini dengan terbatasnya pegawai yang mampu mengoperasikan sistem maka *useroperator* dan *administrator* dipegang oleh satu orang sama. Sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

<i>User administrator</i>	<i>User Operator</i>
<p>Secara umum, fungsinya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendaftarkan pengguna yang akan menggunakan aplikasi e-Rekon &amp; LK.</li> <li>• Mengelola pengguna yang telah terdaftar dalam e-Rekon &amp; LK.</li> </ul>	<p>Secara umum, fungsi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan persetujuan rekonsiliasi</li> <li>• Mencetak BAR elektronik</li> <li>• Melakukan monitoring data</li> <li>• Mencetak laporan keuangan</li> </ul>

Sumber: Manual Aplikasi E-Rekon, data diolah.



Pemahaman yang minim akan teknologi informasi menjadikan keterbatasan kemampuan pegawai dalam menjalankan kebijakan rekonsiliasi dan pelaporan *online* sehingga pekerjaan dalam kaitannya dengan rekonsiliasi dan pelaporan keuangan BUN daerah, *user* administrator dan *user* operator seksi verakseharusnya dipisah, namun dalam praktik lapangan dipegang tanggungjawabnya oleh satu orang. Secara singkat pernyataan Bapak SU selaku operator *E-Rekon & LK* dan operator SPAN modul *General Ledger* pada seksi verak yang bertanggungjawab atas 2 hal tersebut atas, memberikan gambaran sebagai berikut:

“..Di KPPN sesuai tupoksinya (pelaporan keuangan) adalah di seksi verak, *eehh*. (rekonsiliasi) pelaksanaanya.. *hm*.. Yang jelas di seksi verak, cuma petugasnya itu ada salah satu pegawai yang diberi tanggung jawab untuk melakukan rekon, tapi sesungguhnya tidak menutup kemungkinan satu orang saja, artinya dapat siapa saja yang dapat menjalankan aplikasi rekon itu sesungguhnya dapat melakukan rekon antara satker dengan KPPN...”

Dalam penggalan wawancara di atas menggambarkan penjelasan *noesis* dari fenomena yang menjelaskan keterbatasan kemampuan pegawai, hal ini ditemukan dalam wawancara bahwa proses rekonsiliasi dengan 160 satker tanggungjawabnya saat ini hanya bertumpu pada satu pegawai saja, yakni Bapak SU. Walaupun demikian informan mengungkapkan bahwa sesungguhnya dapat dimungkinkan untuk kelancaran tidak hanya satu pegawai saja yang bertugas, namun hal ini masih belum dapat dilaksanakan di KPPN Kediri karena terbatasnya kemampuan pegawai, penjelasan perangkapan user di atas mendiskripsikan bahwa adanya internal kontrol yang lemah.

Pimpinan menetapkan target indeks capaian kinerja rekonsiliasi di seksi verak adalah 100 persen dalam periode pelaporan keuangan setiap bulan. Peneliti merasa bahwa target ini sebenarnya tidak masuk akal karena target yang begitu sempurna, dan faktanya selalu tercapai. Peneliti kemudian berkali-kali mengamati satker, bagaimana mereka bekerja, ternyata kecenderungan di satker

dalam pelaporan keuangan tetap saja ada yang mengalami keterlambatan dalam rekonsiliasi. Hal ini diperkuat oleh penjelasan informan berikut:

“...di satker itu terkait dengan laporan itu satker apa ya.. *males* atau apa.. istilahnya ya kalo kita membicarakan laporan itu keliatannya dinomorduakan.. satker lebih suka mengajukan SPM GU ya,, itu lebih suka.. kecenderungannya seperti itu.. ..”

Dalam e-rekon ada batasan *upload* data rekon tanggal 13 setiap bulannya, tetapi kebijakan internal KPPN menetapkan batas menyelesaikan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan ke KPPN sebelum tanggal 10 setiap bulannya, jika ada rekon setelah tanggal 10 sampai tanggal 13 hanya terkait neraca. Perangkapan fungsi *user* bahkan sampai 3 *user* sekaligus, berikut ini ketiga kewenangan *user* yang dirangkap:

<i>User Administrator</i>	<i>User Operator</i>	<i>User Kuasa Pengguna Anggaran</i>
Secara umum, fungsinya adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendaftarkan pengguna yang akan menggunakan aplikasi e-Rekon &amp; LK.</li> <li>• Mengelola pengguna yang telah terdaftar dalam aplikasi e-Rekon &amp; LK.</li> </ul>	Secara umum, fungsinya adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan persetujuan rekonsiliasi</li> <li>• Mencetak BAR elektronik</li> <li>• Melakukan monitoring data</li> <li>• Mencetak laporan keuangan</li> </ul>	Secara umum, fungsinya adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa ADK rekonsiliasi yang dikirimkan Operator Satker sudah sesuai</li> <li>• Melakukan persetujuan Berita Acara frekonsiliasi</li> </ul>

Sumber: Manual Aplikasi E-Rekon, data diolah.

Hal inilah yang akhirnya dimanfaatkan agar setiap bulannya target rekonsiliasi dapat mencapai target rekonsiliasi. Sebagaimana deskripsinya oleh Bapak SU sebagai berikut:

“...Rekon itu keseluruhan proses, tidak hanya proses itu dilakukan oleh *operator* di satker tapi juga sampai di KPA. Kita ambil contoh ketika satker *upload* dan data itu sudah benar, maka *user* kasi verak kan menyetujui, setelah menyetujui..itu status data berubah menjadi *tttd* KPA sering terjadi saat *tttd* KPA kunjung tidak dilakukan, *Lah* sedangkan di kppn harus mengejar target jangan sampai tanggal 10. Kalo ada kasus seperti itu sering terjadi KPPN melakukan *reset* kemudian kalo kita *reset*, *user*kan jadi baru, *default*kan.. kemudian KPPN akan menjalankan *user* KPA satker untuk rekon, untuk kemudian melakukan *approve*. biar nanti status di e-rekon sudah menjadi status BAR siap *download*, ke satker selanjutnya dihubungi..”

Uraian di atas menceritakan bagaimana cara yang dilakukan oleh informan agar dapat mencapai target 100 persen. Deskripsi *noema* ini memberikan gambaran apa yang dilakukan yakni melakukan reset *user* operator kpa satuan kerja dan menjalanakannya untuk melakukan persetujuan rekonsiliasi, sehingga status rekonsiliasi yang semula menunggu tanda tangan KPA satker, berubah menjadi siap menjadi status BAR siap download. Perilaku oportunistik ini muncul karena sistem internal kontrol yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tuntutan kinerja 100 persen rekonsiliasi rupanya mendorong perilaku oportunistik dalam memanfaatkan celah sistem. Walaupun demikian informan merasa hal tersebut bukanlah suatu bentuk fraud, Karena tidak ada kaitannya dengan dampak kerugian finansial (uang). Sebagaimana penjelasan subjektif sebagai berikut:

“..Inikan menurut saya salah satu bentuk kerja sama, ini kan data aja kan, tidak ada kaitannya dengan uang. Karena pernah saya baca itu namanya rekon secara teknis itu sampai dengan *ttd* KPA dan *ttd* kasi verak sehingga statusnya BAR siap *download*, karena kalo tidak sampai *ttd* kpa dan *ttd* kasi verak itu kategori terlambat, nah kalo terlambat rekon kan harus ada sanksi...”

Penjelasan di atas adalah bentuk *noesis* yang menjadi kesadaran kenapa informan berperilaku demikian, karena sistem telah mendorong capaian kinerja agar status rekonsiliasi 100 tercapai. Perilaku ini disitilahkan sebagai bentuk “*kerja sama*” karena satker juga diuntungkan karena walaupun mereka tidak melakukan persetujuan melalui kewenangan *user*-nya dengan alasan karena sibuk atau lupa, dengan adanya kerja sama sepihak ini satuan kerja juga diuntungkan karena tidak akan terlambat rekonsiliasi sehingga tidak akan terkena sanksi rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan berupa penolakan dari KPPN atas pengajuan pencairan dana DIPA dari satuan kerja.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk "*kerja sama*" ini merupakan tindakan yang disepakati bersama antara KPPN dengan satuan kerja sebagai imbas dari tuntutan yang besar dari pekerjaan yang membuat pegawai bertindak "kreatif" untuk memenuhi target kinerja. Keyakinan ini timbul dari *user* bahwa "kebenaran" laporan keuangan terletak pada kesamaan data yang diperoleh ketika rekonsiliasi dilakukan. Sehingga sikap yang lebih mementingkan kesamaan data daripada validitas data sesungguhnya merupakan cermin tindakan pragmatisme yang memicu sikap oportunis<sup>20</sup> memanfaatkan celah sistem melalui perangkapan *user*. Selanjutnya sebagai bentuk triangulasi sumber data informan potensi kecurangan dari sikap oportunis ini berkaitan dengan pembahasan pada subbab 8.3.

#### **4.4 Refleksi: Lemahnya Internal Kontrol Yang Memicu Motif Oportunis**

Berdasarkan penjelasan pada bab ini, eksplorasi makna akuntansi berdasarkan pemahaman *user operator* di level operasional pada KPPN Kediri dari sisi Bendahara Umum Negara Daerah terdapat makna yang dapat digali oleh peneliti yaitu pemahaman tentang akuntansi yang mementingkan proses, selanjutnya proses kerja akuntansi ini menjadi dasar pijakan pemikiran bahwa kinerja tidak akan dicapai apabila proses tersebut belum memenuhi standar penilaian kinerja.

Suatu proses rekonsiliasi dikatakan selesai apabila sudah melalui proses *approve* atau persetujuan dari pihak KPPN dan satker. Di sisi lain pemaknaan adopsi akuntansi sebagai konsekuensi, *cloud accounting* bermakna tidak dapat dihindari, dan harus dilaksanakan, imbasnya muncul tuntutan dalam pencapaian kinerja rekonsiliasi 100 persen, sehingga pegawai akan melakukan apa saja untuk mencapai tuntutan tersebut.

---

<sup>20</sup>*Pragmatism* mempunyai beberapa sinonim kata salah satunya adalah *opportunism*. Sumber online dari <http://www.thesaurus.com/browse/pragmatism>

Pemisahan *user* merupakan wujud internal kontrol, mewujudkan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui pembagian kekuasaan, sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan untuk menciptakan kondisi saling mengawasi (Yanuarisa dan Irianto, 2014). Celah sistem berupa perangkapan penggunaan *user* disadari sebagai peluang yang dimanfaatkan untuk menembus celah sistem sehingga target kinerja terpenuhi.

Disadari oleh informan bahwa dengan keterbatasan pegawai yang menguasai bidang teknologi informasi akuntansi telah menjadikan praktik internal kontrol menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya perangkapan *user* operator, administrator dan kuasa pengguna anggaran di seksi terkait pelayanan rekonsiliasi. Sehingga pada akhirnya timbulah "kreativitas" dalam memanfaatkan lemahnya internal kontrol dan celah sistem berupa perangkapan penggunaan *user*, dimanfaatkan secara oportunistik demi pencapaian target kinerja yakni target rekonsiliasi laporan keuangan 100 persen.

#### **4.5 Simpulan**

Pengimplementasian akuntansi berbasis *cloud* pada KPPN Kediri, kehadirannya dimaknai sebagai sebuah "kewajiban" yang merupakan konsekuensi dari keharusan untuk memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dalam mendukung pekerjaan. Penerapan akuntansi hadir sebagai kewajiban, atas konsekuensi yang tidak dapat dihindari yang dari hal tersebut memunculkan tuntutan yang harus dipenuhi bagaimanapun caranya.

Pandangan pragmatis percaya akan adanya perubahan yang terus-menerus dalam dunia. Menurut John Dewey, karena kebiasaan terbentuk dan berubah hampir terus-menerus, dan setiap "nilai yang diinginkan" adalah nilai moral bagi mereka sendiri, kita terus-menerus membentuk dan mengubah kebiasaan yang diinginkan (Gribov, 2001). Hal ini sejalan dengan Peirce yang mengklaim bahwa esensi keyakinan adalah pembentukan kebiasaan dalam

bertindak (Godfrey-Smith, 2015). Keyakinan inilah yang mengubah persepsi informan tentang kebiasaan yang diinginkan dan hal ini sesuai dengan bagaimana perubahan kebiasaan bekerja, seperti seringnya lembur, bekerja dari rumah dan seterusnya muncul sebagai tuntutan dalam konteks layanan publik.

Sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, penerapan bentuk akuntansi *cloud* selanjutnya memunculkan tuntutan-tuntutan lebih dalam bekerja yang mau-tidak mau semua tuntutan tersebut harus dipenuhi dengan segala cara, *bak gayung bersambut* hal ini memicu munculnya pendekatan pragmatisme dalam memahami kebenaran laporan keuangan sebagai kondisi "data sama" sebagai utilitas dari rekonsiliasi laporan keuangan dan selanjutnya usaha yang dilakukan oleh *user melalui* pendekatan berbasis hasil "data sama" ini dalam praktiknya sistem akuntansi dijadikan alat untuk mencapai target tuntutan kinerja tersebut. Adapun penjelasan secara rinci tentang eksplorasi makna akuntansi dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 4.1):

**Tabel 4.1 Model Analisis Fenomenologi Transendental: Dibalik Tuntutan Kinerja, Tersimpan Motivasi Oportunis**

Seperti nampak dalam Tabel 4.1, secara ringkas dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab 2 tentang metodologi penelitian. *Epoche* adalah langkah awal pengumpulan dan penyajian data, yaitu kesadaran *user operasional administrator/operator (noesis)* terhadap pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan keuangan *online (noema)*. Langkah berikutnya adalah reduksi fenomenologi untuk menghasilkan pilihan topik yang diangkat menjadi tema besar. Dengan metode yang sama kemudian analisis *noematic-noetic correlates* dilakukan untuk memperoleh makna fenomena. Terakhir, reduksi eiditis dilakukan untuk memperoleh abstraksi makna fenomena.

**Tabel 4.1**  
**Model Analisis Fenomenologi Transendental:**  
**Dibalik Tuntutan Kinerja Tersimpan Motivasi Oportunis**

		<p>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Melalui E-Rekon-LK</p>	<p>Bapak SU:</p> <p>“..rekon itu kan 24 jam.. mau tidak mau apa itu perilaku yang ada di seksi verak harus mengikuti sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada mitra kerja...”</p> <p>“..Dari sisi organisasi kita harus mengikuti polanya, artinya sekarang itu harus berbau <i>high-tech</i>, maka mau tidak mau kita harus mengikutinya...”</p>	<p>➤ Layanan Mandiri:  Layanan 24 Jam,  KPPN Sebagai ATM  Data</p>	<p>Penerapan akuntansi hadir sebagai kewajiban sehingga muncul konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Dari hal tersebut memunculkan tuntutan kinerja yang harus dipenuhi bagaimanapun caranya.</p>	<p>Dibalik Kinerja Tersimpan Oportunis</p> <p>Tuntutan Motivasi</p>
--	--	--	--	--	---	---

	<p>“..Istilahnya KPPN sebagai atm lah.. ATM data. Karena kan Intinya kita ambil uang itu kan juga informasi ya.. satker mau rekon kan, juga mau tau informasi rekon saya lakukan ini sudah benar gak to?, nah kami yang di KPPN sebagai ATM menyampaikan informasi.”</p> <p>“...KPPN sebagai kuasa BUN merangkum data-data dari satker, yang jelas kevalidan data dari satker itu juga merupakan kualitas data yang ada di KPPN...”</p> <p>“..yang penting angkanya sama, jurnalnya dan laporannya nanti sama.. yang penting angkanya sama. Namanya rekon kan datanya satu, data dari satker, cuma diproses berbeda-beda.. kalo datanya sama pasti akuntansinya sama.. itu pasti LK juga sama. Kalo menurut saya, mesti benar.”</p> <p>“..Di KPPN sesuai tupoksinya adalah di seksi verak, eehh. pelaksanaanya.. hm..Yang jelas diseksi verak, cuma petugasnya itu ada salah satu pegawai yang diberi tanggung jawab untuk melakukan rekon...”</p>	<p>➤ Dilema Kevalidan Data Satker, Cermin Pragmatisme Kebenaran Laporan Keuangan pemerintah</p> <p>➤ Lemahnya Internal Kontrol Dan Perilaku Oportunis</p>		
--	--	---	--	--



	<p>“...di KPPN harus mengejar target jangan sampai tanggal 10. Kalo ada kasus seperti itu sering terjadi KPPN melakukan reset kemudian kalo kita reset, <i>user</i>kan jadi baru, defaultkan.. kemudian KPPN akan menjalankan <i>user</i> KPA satker untuk rekon, untuk kemudian melakukan approved. biar nanti status di e-rekon sudah menjadi status BAR siap download, ke satker selanjutnya dihubungin.”</p> <p>“..Inikan menurut saya salah satu bentuk kerja sama, ini kan data aja kan, tidak ada kaitannya dengan uang....”</p>				
--	---	--	--	--	--